

**PEMBERDAYAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
SIDOMAKMUR KAMPUNG SUKAJADI BUMI RATU NUBAN**

TESIS

Oleh

Erma Eni
1926061014



**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PEMBERDAYAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
SIDOMAKMUR KAMPUNG SUKAJADI BUMI RATU NUBAN**

Oleh

Erma Eni

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Pada

**Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SIDOMAKMUR KAMPUNG SUKAJADI BUMI RATU NUBAN

Oleh

Erma Eni

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani di Provinsi Lampung adalah dengan menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan dan pembinaan terhadap petani. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Bagaimana anggota gapok dalam memberi motivasi kepada petani untuk menggerakkan potensi ekonomi, meningkatkan kapasitas poktan dan melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi para poktan di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Gapoktan Sido Makmur Kampung Sukajadi memiliki fenomena bahwa masyarakat khususnya petani mendapatkan hal yang mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan pentingnya membentuk Gapoktan. Gabungan Poktan Sido Makmur ini sendiri selaras dengan program pemerintah daerah Lampung Tengah. Pada tahun anggaran 2013 Gapoktan mendapatkan bantuan PUAP untuk mengembangkan kelompok tani yang tergabung dalam Poktan Sido Makmur. Sudah adanya bentuk nyata untuk penguatan daya untuk langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikemukakan bahwa sebuah pemberdayaan masyarakat petani melalui peran Gapoktan perlu adanya pertimbangan yang cukup matang terkait dengan penentuan stakeholder demi menunjang kesejahteraan petani.

Kata Kunci : Pemberdayaan, *Enabling, Empowering, Protecting.*

ABSTRACT

EMPOWERMENT OF SIDOMAKMUR GAPOKTAN IN VILLAGE OF SUKAJADI BUMI RATU NUBAN

By

Erma Eni

One of the efforts to improve the welfare of farmers in Lampung Province is to organize various empowerment and coaching programs for farmers. GAPOKTAN is expected to play a role in the functions of fulfilling agricultural capital, fulfilling production facilities, marketing agricultural products, and including providing various information needed by farmers. How do gapok members motivate farmers to mobilize economic potential, increase the capacity of poktans and protect the economic interests of poktans in Kampung Sukajadi, Bumi Ratu Nuban District. Gapoktan Sido Makmur Kampung Sukajadi has a phenomenon that the community, especially farmers, get things that encourage, motivate, and raise awareness of the importance of forming Gapoktan. The Sido Makmur Poktan Association itself is in line with the program of the Central Lampung regional government. In the 2013 fiscal year Gapoktan received PUAP assistance to develop farmer groups that are members of the Sido Makmur Poktan. There is already a real form of strengthening power for steps to improve people's welfare. It was argued that an empowerment of farming communities through the role of GAPOKTAN requires sufficiently mature consideration related to the determination of stakeholders in order to support the welfare of farmers.

Keywords: Empowerment, Enabling, Empowering, Protecting.

Judul Tesis : **PEMBERDAYAAN GABUNGAN
KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
SIDOMAKMUR KAMPUNG SUKAJADI
BUMI RATU NUBAN**

Nama : **Erma Eni**

Nomor Induk Mahasiswa : **1926061014**

Jurusan : **Magister Ilmu Administrasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**





MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Susana Indrivati C, M.Si
NIP.19700914 200604 2 001


Dr. Ani Agus Puspawati, M.A.P
NIP. 19830815 201012 2 002

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi**


Dr. Suropto, S. Sos., M.A.B
NIP 19690226 199903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

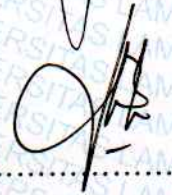
Ketua

: Dr. Susana Indriyati C, M.Si.



Sekretaris

: Dr. Ani Agus Puspawati, M.A.P.



Penguji

: Dr. Dedy Hermawan, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si

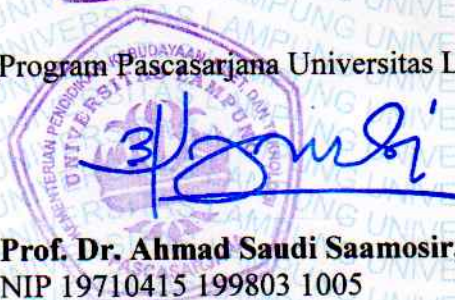
NIP 19610807198703 2001



3. Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Saamosir, S.T., M.T.

NIP 19710415 199803 1005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 2 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini dengan judul : **Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sido Makmur Kampung Sukajadi Bumi Ratu Nuban**, adalah karya saya dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada universitas lampung .

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya ; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 februari 2023



Erma Eni
Npm 1926061014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama LENGKAP erma eni , lahir di desa/kampung sukajadi ,kecamatan bumi ratu nuban , kabupaten lampung tengah, pada tanggal 01 juni 1996. Penulis merupakan ank pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak sukardi dan ibu mesiasi.

Penulis memulai pendidikan di sd negeri sukajadi pada tahun 2002-2008,kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 32 Muaro Jambi pada tahun 2008-2011,dan menempuh pendidikan di SMA Purnama pada tahun 2011-2014.

Kemudian di tahun 2014 penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1 DI Dharma WACANA METRO JURUSAN Ilmu ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU sosial dan ilmu politik. Lalu di taun 2019 penulis melanjutkan pendidikan s2 di universitas lampung pada program magister ilmu administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (publik).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahir

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah engkau ridhai langkah dalam segala proses hambamu ini, sehingga tesis ini pada akhirnya dapat di selesaikan. Seiring shalawat serta salam kepada junjungan nabi MUHAMMAD saw semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda sukardi dan ibunda mesiaty beserta adik yang ku sayangi abima saputra sebagai tanda bakti, hormat, dan cintaku.

Terimakasih ayah dan ibu yang telah membesarkanku dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih dan sayang .

Almamater tercinta universitas lampung

MOTTO

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

“Sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang- bintang.” (HR.Abu Dawud (3641), Ibnu Majah (223), dari hadits Abu Darda’ Radhiallahu Anhu).

Kerjakanlah semua urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kerjakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.” (HR. Ibnu Asakir)

“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan mungkin bisa bertahan.” -Najwa Shihab

SUATU KEBERHASILAN MEMBUTUHKAN SUATU PROSES DAN PENGORBANAN. JANGAN PERNAH TAKUT KEHILANGAN SEDIKIT WAKTU ,TENAGA DAN FIKIRAN DALAM MENJALANKAN PROSES DEMI KEBERHASILAN.(BY ERMA ENI)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya, tesis ini dapat diselesaikan tesis yang berjudul “pemberdayaan gabungan kelompok tani (gapoktan) Sido Makmur Kampung Sukajadi Bumi Ratanuban ” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister sains (M.Si).

Penyusun tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku rektor universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T, M.T., selaku direktur pascasarjana universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Suropto, S.Sos, M.AB. Ketua Jurusan Program Pascasarjana Jurusan Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, M.Si., selaku pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan saran perbaikan yang sangat berarti untuk mendukung terselesaikannya tesis ini.

6. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, M.A.P., selaku pembimbing kedua yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan hal-hal baru terkait penyusunan sebuah karya tulis ilmiah serta selalu memotivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran serta membagikan pengalaman sehingga dapat mendukung penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah memberi motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh dosen dan staff program pascasarjana jurusan magister ilmu administrasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua,terimakasih sudah bekerja keras,berusaha dan selalu berdoa untuk mengantarkanku penyelesaian pendidikan ini.
11. Seluruh teman-temanku seperjuangan mia 2019,mba meri,mba yuda,mb mira,mba iranda,mba netilia,mba imah,mba vera,mba imas,mba lovi,mba dini,mba defita,mba lidiya,mba mike,mba anggun,bang olaf,bang ibnu,bang iswanto dan bang wiryawan trimakasih atas keceriaannya dan kebersamaan kita. sukses selalu untuk kita semua.
12. Semua pihak yang telah membantuterselesaikannya tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Almamater universitas lampung yang telah berkontribusi dalam mendewasakan pikiran,tingkah laku,dan cara pandang.juga sebagai wadah menimba ilmu yang sangat berharga bagi penulis.

Ahir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan,akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT berkenan memberikan imbalan pahala yang setimpal dan semoga ilmu yang telah penulis peroleh bermanfaat , amin YRA.

Bandar lampung, 2 februari 2023
Penulis

Erma Eni,S.A.P

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Pemberdayaan Masyarakat	14
2.2.1. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	25
2.2.2. Tingkatan Pemberdayaan.....	28
2.2.3. Membuat Tantangan Menjadi Peluang.....	29
2.2.4. Konsep Pembinaan	30
2.2.5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat	31
2.3 Konsep Gabungan Kelompok Tani	34
2.3.1 Ciri- Ciri Kelompok Tani.....	36
2.3.2 Unsur Pengikat Kelompok Tani.....	36
2.3.3 Fungsi Kelompok Tani	36
2.3.4 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).....	37
2.4 Kerangka Pemikiran	43
III. METODE PENELITIAN	45
3.1 Tipe Penelitian	45
3.2 Fokus Penelitian.....	46
3.3 Lokasi dan Tahapan Penelitian.....	47
3.4 Subjek Penelitian	48
3.5 Instrumen Penelitian	49

3.6 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6.1. Wawancara.....	50
3.6.2. Observasi	52
3.6.3. Dokumen.....	55
3.7 Keabsahan Data	55
3.8 Teknik Analisis Data	56
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
4.1.1. Kondisi Pertanian	60
4.1.2. Deskripsi Umum Kampung Sukajadi	61
4.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kampung Sukajadi Lampung Tengah	62
4.3. Fungsi Masing-Masing Unit Gapoktan Sido Makmur.....	71
4.4. Hasil Penelitian	75
4.4.1. Enabling	76
4.4.2. Empowering	83
4.4.3. <i>Protecting</i>	89
4.5. Pembahasan.....	97
V. KESIMPULAN DAN SARAN	114
5.1. Kesimpulan	114
5.2. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1.	Profil Informan Penelitian	51
Tabel 3.2.	Tabel Observasi Penelitian	53
Tabel 4.1	Luas lahan dan produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah	60
Tabel 4.2	Jenis-jenis benih unggul yang diintroduksi di Kabupaten Lampung Tengah	61
Tabel 4.3.	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	62
Tabel 4.4.	Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan	62
Tabel 4.5.	Data kelompok Tani Kampung Sukajadi	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Pemberdayaan Menurut Ruth Alsop, Mette Frost Bertelsen, dan Jeremy Holland	23
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	45
Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)	57
Gambar 4.1. Denah Kampung Sukajadi	70
Gambar 4.2. Menanam dengan sistem Jajar Legowo	78
Gambar 4.3. Pertemuan Kelompok Tani di Kampung Sukajadi	80
Gambar 4.4. Diskusi Rutin yang dilakukan Anggota Gapoktan	82
Gambar 4.5. Pelatihan Kelompok Tani dalam Pembuatan Pupuk Kompos ..	85
Gambar 4.6. Bentuk Pemberdayaan Gapoktan (Distribusi Pupuk)	87
Gambar 4.7. Kegiatan yang melibatkan Stakeholder dan PPL Terkait saat musim panen tiba	92
Gambar 4.8. Pengenalan dan Pengembangan Teknologi Pertanian	94
Gambar 4.9. Musyawarah Rutin yang dilakukan Anggota Gapoktan	101
Gambar 4.10 Pembelian Gabah Dari Kelompok Tani	104
Gambar 4.11 Pembangunan JIT (Jaringan Irigasi Tersier)	108
Gambar 4.12 Pengawasan dan Pembangunan JIT oleh PPL dan Bhabinsa ..	110

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda utama yang harus direalisasikan oleh pemerintah melalui pembangunan nasional. Isu pangan menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena kedudukannya sebagai kebutuhan paling mendasar bagi manusia yang harus terpenuhi untuk dapat hidup dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menurut Handewi dan Mewa (2002), peningkatan ketahanan pangan sangat penting dilakukan dalam rangka memberi jaminan pada warga negara untuk dapat hidup sehat dan bekerja secara produktif.

Pertanian merupakan sektor pangan yang penting di Indonesia terutama dalam menghasilkan komoditas dan menjamin pasokan makanan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses pembangunan pertanian yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menopang ketahanan pangan terutama dalam menjaga ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup bagi warga untuk menopang kegiatannya sehari-hari sepanjang waktu. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian pada *1ST International Conference on Applied Science for Energy and Food Sovereignty* di IPB ICC Bogor, 12 Oktober 2017 menerangkan bahwa salah satu agenda penting dari sektor pertanian saat ini adalah meningkatkan diversifikasi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani (Badan Ketahanan Pangan, 2017).

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (Hendro Wibowo, 1998) merupakan hasil interaksi di tingkat ideologis antara growth (pertumbuhan), dengan people centered. Konsep ini lebih luwes, tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari satu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi langsung (partisipasi) demokrasi dan pembelajaran masyarakat melalui pengalaman langsung, sebagai titik focus pemberdayaan adalah lokalitas.

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani di Provinsi Lampung adalah dengan menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan dan pembinaan terhadap petani. Program pemberdayaan dan pembinaan ini disebut-sebut dapat membantu petani mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan (Kementan, 2020). Menurut Menteri Pertanian, program-program pemerintah ke depannya akan lebih menekankan pada upaya menyediakan akses petani terhadap berbagai sarana produksi, akses pembiayaan, penanganan panen dan pasca panen, pemasaran hasil pertanian, jaminan sosial, hingga jaminan pendidikan pertanian bagi petani yang sukses (Kementerian Pertanian, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM.050/ 12/ 2016 Kelembagaan Petani merupakan lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Pada pasal 1 (2) disebutkan bahwa yang termasuk Kelembagaan Petani terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. Pembentukan Kelembagaan Petani sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penyuluhan dengan

pendekatan kelompok. Penyuluhan seperti ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM.050/12/2016 merupakan tindak lanjut dari Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM.050/12/2016 sekaligus pengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013. Perubahan peraturan ini dilakukan demi memberi kepastian hukum dalam pelayanan dan pembinaan kepada Kelembagaan Petani.

Berdasarkan Permentan No 82 Tahun 2013 Penumbuhan gapoktan, dilakukan melalui tahapan, yaitu: persiapan dan proses penumbuhan diantaranya Penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap poktan yang berpotensi untuk ditingkatkan kemampuannya melalui pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan poktan. Penyuluh pertanian melakukan advokasi (memberikan saran dan pendapat) serta informasi kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan persiapan Gapoktan.

Dalam pengembangan kelompok tani, Pemerintah dan pemerintah daerah pada dasarnya berperan menciptakan iklim untuk berkembangngnya prakarsa dan inisiatif para petani, memberikan bantuan kemudahan/fasilitas dan pelayanan informasi serta pemberian perlindungan hukum. Pengembangan kelompok tani diselenggarakan di semua tingkatan dari tingkatan Desa, Kecamatan dan Provinsi. Seperti yang tertuang pada Permentan No 273 Tahun 2007 tetntang pedoman

pembinaan lembaga petani, menerangkan bahwa Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat desa adalah Kepala Desa, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah tersebut.

Salah satu Kelembagaan Petani yang bernilai strategis dalam meningkatkan daya saing dan skala ekonomi petani adalah penguatan fungsi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melalui unit usaha. Menurut Peraturan Menteri Pertanian N0 67 Tahun 2016 pada Bab III Pasal 3 ayat a sampai e.

Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan Poktan ke dalam Gapoktan, diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing. Poktan dan Gapoktan dapat berkolaborasi dan meningkatkan status kelembagaannya menjadi Asosiasi Komoditas Pertanian yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Masing-masing Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkumpul dan meningkatkan status kelembagaannya menjadi Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Gabungan dari masing-masing tingkatan kelembagaan di atas diharapkan dapat membentuk suatu ekosistem pertanian yang ekonomis dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan pra observasi peneliti dengan Ketua Gapoktan mengungkapkan bahwa tak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa permasalahan kritis yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Gapoktan. Salah satu isu yang tampil ke permukaan adalah fenomena yang

tergambar di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa/ Kampung Sukajadi, Kabupaten Lampung Tengah yakni permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dialami oleh Pengurus Gapoktan di sana (Ketua Gapoktan, 2020). Gapoktan di Kampung Sukajadi sendiri memiliki 11 Kelompok Tani yang terdiri dari 10 Kelompok Tani dan 1 Kelompok Wanita Tani (KWT). Keseluruhan kelompok tani tersebut merupakan aktor dalam pemberdayaan Gapoktan di Kampung Sukajadi. Aktor yang terlibat dalam menjalankan tugas dan fungsi gapoktan antara lain petani, kelompok tani, pelaku usaha pertanian dan penyuluh pertanian.

Secara filosofis, kelompok tani Sidomakmur dibentuk untuk memecahkan permasalahan sehingga bisa berproduksi secara optimal dan efisien. Sebab dengan pertanian terkonsolidasi dalam kelompok tani, pengadaan sarana produksi dan penjualan hasil bisa dilakukan secara bersama. Dengan demikian, volume sarana produksi yang dibeli dan volume hasil yang dijual menjadi lebih besar, sehingga biaya pengadaan per satuan sarana dan pemasaran per satuan hasil menjadi lebih rendah. Rasionalisasi usaha tani yang mengejar efisiensi dan nilai tambah ini akan mereduksi petani tradisional. Keberadaan Penyuluh Lapangan sendiri terbilang sangat penting dalam memberdayakan Gapoktan pada suatu Desa/Kampung.

Kampung Sukajadi sendiri memiliki persoalan dari sektor pertanian sehingga mengharuskan adanya partisipasi dan kolaborasi antara Gapoktan Sidomakmur dan PPL. Beberapa persoalan teknis dalam sektor pertanian kampung sukajadi sebelum adanya pemberdayaan Gapoktan oleh Penyuluh Lapangan antara lain, Permodalan dalam pengembangan pertanian, pupuk subsidi yang sulit

didapatkan, perlakuan benih belum maksimal, penanganan penyakit pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan sanitasi pertanian.

Hasil penelitian tahap awal yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan ketua Gapoktan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan SDM yang perlu diperhatikan apabila ingin mewujudkan daya saing dan skala ekonomi setiap unit usaha Gapoktan di Kampung Sukajadi, di antaranya adalah :

1. Belum optimalnya Gapoktan dalam mengakses dan mengoptimalsiasi rantai pasok dan sistem distribusi pupuk. Hal ini diperoleh berdasarkan wawancara ketua gapoktan dan kelompok tani menyatakan bahwa memang dalam rantai pasok pupuk mengalami kendala dalam permodalan bahkan distribusi pupuk.
2. Kurangnya pemahaman terhadap model bisnis dan proses distribusi hasil pertanian.
3. Lambatnya adaptasi penggunaan alat/ teknologi seperti penggunaan alat mesin pertanian, maupun pengembangan model bisnis pertanian yang relevan digunakan.

Ketua Gapoktan Sukajadi menuturkan bahwa fenomena tersebut bisa muncul sebagai akibat dari belum optimalnya peran Gapoktan dalam memberdayakan, mendidik, dan membina sistem kepengurusan yang dinaungi olehnya (Wawancara Ketua Gapoktan, 2020).

Hasil pengamatan awal penulis juga menunjukkan bahwa Gapoktan di Kampung Sukajadi dapat dilihat pada proses pendistribusian pupuk yang belum optimal

sehingga Poktan yang berada di dalam naungannya kesulitan dalam mengakses distribusi pupuk. Skenario distribusi yang digunakan hingga saat ini adalah Gapoktan menebus pupuk melalui koordinasi langsung kepada setiap Poktan. Ketua Gapoktan Sukajadi sendiri telah mensosialisasikan cara membeli pupuk dengan mengadakan kas petani yang diselenggarakan setiap bulan sekali antar kelompok petani dengan harapan dapat mempermudah petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Meski begitu, sampai saat ini kebutuhan pupuk petani pada kenyataannya belum tercukupi secara optimal karena masih seringnya terjadi keterlambatan pengiriman sehingga pupuk sulit diperoleh petani tepat pada waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, dapat terlihat bahwa Gapoktan masih mengalami kesulitan dalam membina cara koordinasi dan komunikasi antara setiap kelompok petani dengan *stakeholder* dalam hal ini distributor dan pengecer pupuk (Data hasil observasi awal, 2020).

Hasil wawancara terhadap Ketua Gapoktan dan beberapa petani pada tahap pra-penelitian juga menunjukkan beberapa masalah lain di antaranya adalah kesenjangan pengetahuan (*discrepancy of knowledge*) yang cukup tinggi terkait penggunaan model bisnis dalam memasarkan komoditas pertaniannya. Kondisi ini semakin mempersulit petani untuk memetakan komoditas unggulan yang memiliki keunikan dan dapat meningkatkan nilai tambah di pasar. Ketua Gapoktan mengakui bahwa proses sosialisasi dan pemberdayaan terhadap petani yang saat ini berjalan belum menyentuh aspek model bisnis dan distribusi pertanian melainkan masih berputar pada permasalahan-permasalahan klasik seperti peningkatan hasil panen dan pengendalian hama (Wawancara Ketua Gapoktan, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 67 Tahun 2016, masalah-masalah di atas dapat diselesaikan melalui penumbuhan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap Gapoktan sebagai bagian dari Kelembagaan Petani. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penumbuhan, pembinaan, dan pemberdayaan Gapoktan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melalui Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana operasional. Penyuluh pertanian sendiri secara organisasi berada di bawah satuan kerja yang tersebar dari sektor Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi hingga tingkat pusat. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyuluhan dan berkaitan dengan metode penyuluhan pertanian yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permentan) No 52 Tahun 2009 terdapat dasar pemilihan metode penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dapat menggunakan satu atau lebih metode penyuluhan. Apabila lebih dari satu metode penyuluhan yang terpilih, maka pelaksanaannya dapat dilakukan antara lain pengulangan, berurutan dan kombinasi. Tentunya dalam menetapkan metode penyuluhan tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat mengembangkan keswadayaan
2. Dapat menjangkau sasaran dalam jumlah dan mutu cukup, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, dan menggunakan fasilitas dan media secara efektif dan efisien.
3. Dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaannya
4. Partisipasi aktif sasaran

Fahrudin (2012) menjelaskan bahwa upaya penyuluhan, pembinaan, dan pemberdayaan yang efektif setidaknya harus memuat tiga aspek penting yakni 1) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang. 2) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. 3) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan. Pemberdayaan dengan model seperti di atas diharapkan dapat membantu petani dalam mengelolah lahan pertaniannya serta meningkatkan skala ekonomis dari hasil pertaniannya sebagai sebuah komoditas unggul yang berdampak pada kesejahteraan sosial bagi para petani yang tergabung dalam Gapoktan tersebut. Sri dan Dewa (2011) menjelaskan bahwa fungsi pemberdayaan yang dijalankan Gapoktan dalam menggerakkan perekonomian antara lain dengan berupaya memperkuat posisi tawar, terutama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif . Lebih luas lagi, Pujiharto (2012) menjelaskan Gapoktan melalui proses pemberdayaan dapat membantu petani dapat terhubung dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Selain dari pada itu, Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti sejauhmana proses pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian terhadap unsur-unsur Gapoktan dalam menjalankan perannya meningkatkan daya saing dan skala ekonomis pertanian di Kampung Sukajadi dengan judul **Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sidomakmur Kampung Sukajadi Bumi Ratu Nuban.**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian sebagaimana diuraikan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pemberdayaan Gapoktan Sidomakmur di Kampung Sukajadi Bumi Ratu Nuban?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menelaah dan menganalisis proses pemberdayaan kelompok tani di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini secara teoretik diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan administrasi pemerintahan terutama dalam pengembangan disiplin pemberdayaan masyarakat dalam konteks kebijakan publik. Penelitian ini dapat dijadikan landasan strategis dalam pematangan aspek-aspek organisasional/ kelembagaan yang berorientasi pada keterlibatan masyarakat. Selain memberi umpan balik bagi Pemerintah Kabupaten penelitian ini juga dapat memfasilitasi pengembangan metode dan teknik pemberdayaan masyarakat terutama berkaitan dengan proses kelembagaan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten dalam mendesain kegiatan dan program

pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani yang handal dan akuntabel serta berorientasi pada keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program pemberdayaan dan penyuluhan yang lebih relevan, futuristis, dan berbasis pada keterlibatan masyarakat sebagai upaya mewujudkan keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>Implementation of Community Empowerment Of Farmers Takalar Regency, South Sulawesi, Indonesia</i> Erick Rahim, Muhammad Basri, Fakhri Kahar (2018)	Pemberdayaan Petani, Berdaya Saing, Pendidikan dan Pelatihan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan petani adalah bagian dari upaya pemerintah melibatkan petani sebagai subjek dan bukan sekedar objek pembangunan. Pemberdayaan dilaksanakan untuk mengembangkan pola pikir petani, menumbuhkan dan memperkuat komunitas dan kelompok tani sebagai institusi sosial sehingga menjadi lembaga yang independen dan berdaya saing tinggi. Beberapa aktivitas pemberdayaan yang dilaporkan dalam penelitian ini terdiri dari pendidikan dan pelatihan serta konseling dan mentoring dalam rangka pengembangan sistem dan sarana-sarana pemasaran agricultural.
2	<i>Community Empowerment and Farmer Poverty Reduction in Developing Countries</i> Budi Permadi (2019)	Komunitas Petani, Kebutuhan Rumah Tangga Petani	Penelitian ini menggambarkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh komunitas petani di negara berkembang biasanya disebabkan oleh rendahnya kemampuan petani dalam berinvestasi, ketergantungan terhadap pendanaan, tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga petani, dan tidak memadainya akses financial. Temuan dalam penelitian ini menyarankan terselenggaranya program-program yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan seperti penciptaan pasar, asistensi kelompok tani, pelatihan, konseling, dan sarana pinjaman.
3	Peran Gabungan Kelompok Tani	Pupuk Bersubsidi,	Adanya peran gabungan kelompok tani dalam membantu masyarakat dalam

	(Gapoktan) Dalam Pembangunan Desa (Studi Desa Balarejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)	PUAP, Mutu Hasil Panen	bentuk penyaluran pupuk bersubsidi, bibit dan bajak yang dapat membantu masyarakat dalam pengolahan pertanian sehingga meningkatkan mutu hasil panen dan menambah penghasilan masyarakat petani kemudian faktor pendukung yang sangat mempengaruhi yaitu adanya dana PUAP yang dihibahkan kepada masyarakat.
4	Partisipasi Petani Dan Efektivitas Gapoktan dalam Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin	LDPM, Efektifitas Gapoktan	Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) partisipasi petani dalam program LDPM tergolong sedang (57,04%), (2) efektivitas Gapoktan tergolong tinggi (79,92%), dan (3) terdapat hubungan positif signifikan antara partisipasi petani dengan efektivitas Gapoktan dalam program LDPM dengan nilai koefisien korelasi Peringkat Spearman (R_s) = 0,479 pada 0,01.
5	Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk) Sean Fitria Rohmawati Laily, Heru Ribawanto, Farida Nurani (2020)	Ketahanan Pangan Desa, bantuan benih, Terbatasnya alat pertanian	Faktor pendukung utama keberhasilan peningkatan ketahanan pangan di Desa Betet adalah berjalannya program dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah serta adanya bantuan subsidi dan benih. Hambatannya datang dari masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan alat pertanian. Hal ini diperlukan adanya sinergi diantara petani, masyarakat serta pemerintah untuk secara bersama-sama mendukung program pemberdayaan petani untuk meningkatkan ketahanan pangan
6	Peran gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) dalam Pemberdayaan Petani di Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Willcony Wakerkwa, Didik Daryanto, Andri Krisna Dianto (2022)	Sosial, Ekonomi, Pekerja, Produktifitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan GAPOKTAN dalam meningkatkan pengetahuan melalui pertemuan pengurus kelompok tani dari GAPOKTAN Kedayang, (b) Pertemuan kelompok tani yang dihadiri oleh pengurus GAPOKTAN dan PPL sebagai nara sumber. (2) Peranan GAPOKTAN dalam merubah pola pikir anggota GAPOKTAN adalah study banding, Pelatihan Ketrampilan,
7	Peranan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Dalam Pemberdayaan Petani Padi Sawah Di Desa Tuo Sumay	Peranan, Pemberdayaan, Gapoktan	Peranan gapoktan di daerah penelitian menunjukkan berada dalam kategori tinggi yaitu sebagai lembaga sentral dalam system yang dibangun, Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan untuk membantu petani miskin dan

	Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Holikman, Evo Aprianto, Widuri Susilawati (2019)		rawan pangan dan Fungsi Gapoktan di daerah penelitian dalam kategori puas yaitumerupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar
8	Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Gapoktan Sinar Tani Di Desa Rulung Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Hidayatulloh, Sumaryo, Indah (2021)	<i>Agricultural Extension Workers, Farmer Groups</i>	Peran penyuluh Desa Rulung Raya terhadap pengembangan gapoktan yaitu peran sebagai pendamping masuk dalam kategori cukup. Peran sebagai organisator masuk dalam kategori berperan. Peran sebagai teknisi masuk dalam kategori kurang. Peran sebagai jembatan penghubung masuk dalam kategori cukup. Terdapat hubungan yang nyata antara peran penyuluh sebagai pendamping (X1), peran sebagai teknisi (X3), dan peran penyuluh sebagai jembatan penghubung (X4) terhadap tingkat pengembangan gapoktan. Peran penyuluh sebagai organisator (X2) tidak berhubungan nyata dengan tingkat pengembangan gapoktan.
9	Pemberdayaan Pengurus Gapoktan Teratai Untuk Meningkatkan Tatakelola Administrasi Simpan Pinjam Bagi Masyarakat Di Desa Srikuncoro Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu Yusmaniarti, Marini, Ratnawili (2019)	<i>Keterampilan Administrasi, Simpan Pinjam, GAPOKTAN</i>	Masalah utama yang menjadi fokus dalam pengembangan simpan pinjam GAPOKTAN teratai adalah pengetahuan dan pemahaman SDM tentang administrasi keuangan simpan pinjam masih rendah dan belum mendapat pembinaan dalam pengembangan usaha. Peningkatan pengetahuan tentang adminstasi keuangan sangat penting untuk membuat laporan keuangan yang benar dan akuntabel . Laporan keuangan yang benar dan akuntabel sangat penting untuk memperoleh imformasi mengenai posisi dan kinerja keuangan. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelatihan dan pendampingan yang melibatkan anggota dan unsur pengurus simpan pinjam GAPOKTAN Teratai dalam hal administasi simpan pinjam dan pembuatan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi acuan referensi dalam penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan antara beberapa penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini diantaranya judul :

Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sidomakmur Kampung Sukajadi Bumi Ratu Nuban.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Dengan diterapkannya otonomi daerah dan asas desentralisasi seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan diperbaharui oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, lahirlah *local government* (pemerintah daerah) yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah di dalam kegiatan untuk menyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, harus diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Prinsip-prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan, (*equity*), Partisipasi (*participation*), Akuntabilitas (*accountability*) dan tranparansi (*transparency*). Salah satu prinsip *good governance* yang sangat penting adalah partisipasi masyarakat karena merupakan salah satu indikator atau ciri-ciri eksistensi sistem pemerintahan yang demokratis dimana partisipasi masyarakat di sini tidak hanya dilihat dari sebatas sebagai keterlibatan saja, namun juga dari berbagai aktivitas lain yang berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat banyak. Misalnya di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat yang paling sederhana yaitu di tingkat desa.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Hurairah, 2008). Rappaport mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat,

organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Sebelum diuraikan lebih jauh mengenai pemberdayaan masyarakat, terlebih dahulu diulas mengenai definisi pemberdayaan masyarakat. Definisi-definisi terkait pemberdayaan masyarakat telah diuraikan oleh para ahli. Dari berbagai definisi yang ada, secara garis besar mengandung pengertian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan atau kemampuan orang atau kelompok lemah terkait akses informasi ke sumber daya, partisipasi atau keterlibatan dalam pembangunan, memegang pertanggung jawaban pihak yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan kemampuan membuat keputusan dengan dukungan lembaga lokal.

Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi

dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik (Soewarman, 2002).

Selanjutnya, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional (Wrihatnolo, 2007).

Selama ini paradigma pembangunan didominasi oleh kapitalisme dan sosialisme. Sintesa dari kedua paham tersebut dapat berbentuk: welfare state, growth dan humanizing. Pendekatan tersebut mengalami pemitosan dan akhirnya terjadinya demistifikasi. People centered development memuat doktrin kapitalisme, dengan paradigma best government is less intervention, free market economy and capital oriented. Menurut Agus Suman sebagaimana dikutip oleh Hendro Wardhono (1998) kapitalis dapat mengangkat kesejahteraan rakyat bagi sebagian negara. Namun demikian, sosialisme menuduh kapitalisme menciptakan eksploitasi antar kelas, dan justru tingkat upah buruh lebih tinggi di negara sosialis. People centered termasuk paradigma humanizing, yang berasal dari pensintesisan paradigm welfare (kesejahteraan) yang menjadikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Komitmennya adalah melaksanakan program sesingkat

mungkin, serta jalur selangsung mungkin, terutama dengan meningkatkan akses mereka kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan.

Pendekatannya adalah memberi pendisainan program yang memberi paket teknologi, sarana produksi, dana, logistik, subsidi yang mendorong masyarakat tumbuh dan sejahtera, tetapi cenderung dipandang sebagai obyek amaliah (Korten, dalam Hendro Wibowo, 1998). Konsep pemberdayaan menurut Friedman (Hendro Wibowo, 1998) merupakan hasil interaksi di tingkat ideologis antara growth (pertumbuhan), dengan people centered. Konsep ini lebih luwes, tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari satu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi langsung (partisipasi) demokrasi dan pembelajaran masyarakat melalui pengalaman langsung, sebagai titik focus pemberdayaan adalah lokalitas.

Menurut Friedman (Hendro Wibowo, 1998) hal ini disebabkan karena civil society merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Ia mengingatkan bahwa sangat tidak realistis jika kekuatan ekonomi dan stuktur di luar civil society diabaikan. Oleh karenanya menurut Friedman pemberdayaan tidak hanya sebatas ekonomi saja namun secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar menawar (bargaining power) baik secara nasional maupun internasional. Ini sebenarnya sudah sangat erat hubungannya dengan pendapat Freire, sebagaimana dikatakan oleh Escobar (1998) bahwa sistem pendidikan yang tidak memberdayakan, dampaknya akan menjadikan produk pendidikan

sebagai penguasa-penguasa baru yang akan memperdaya bukan memberdayakan masyarakat.

Dalam proses ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki. Menurut Priyono dan Pranarka (1996) dalam Fahrudin (2012) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Swift dan Levin (Mardikanto, 2010), mendefinisikan pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

- a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Senada dengan definisi tersebut, Bernard Crick (Azizy, 2003) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha untuk menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Partisipasi ini pada dasarnya merupakan prasyarat terwujudnya kehidupan demokrasi.

Masih dalam kerangka pengambilan keputusan, Alsop, *et. Al*(2006), mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu kapasitas kelompok atau individu untuk membuat pilihan yang efektif, yaitu untuk membuat pilihan dan mengubah pilihan-pilihan tersebut kedalam tindakan yang diinginkan dan *outcomes*. Sumodiningrat (2007) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

Meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Secara lebih luas, Bank Dunia (Narayan, ed, 2002), mendefinisikan pemberdayaan adalah ekspansi aset dan kemampuan orang miskin berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, pengaruh, kontrol dan memegang akuntabilitas lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Robert Chambers (Alfitri, 2011), Membingkai definsi pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep

pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people center*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable*.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemampuan orang atau kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses ke informasi terhadap sumber-sumber daya, berpartisipasi atau keterlibatan dalam pembangunan, memegang pertanggung jawaban pihak-pihak yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan kemampuan dalam membuat keputusan dengan dukungan kelembagaan lokal.

Istilah lain yang seringkali mengikuti pemberdayaan adalah keberdayaan masyarakat. Menurut Wrihatlono dan Dwidjowijoto (2007), keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dinamis dalam mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari wawasan politik pada tingkat nasional yang disebut ketahanan nasional.

Senada dengan definisi tersebut, Mardikanto (2010), mendefinisikan keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu untuk bersenyawa dengan masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberdayaan masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk bertahan (*survive*), mengembangkan diri, dan mencapai kemajuan dalam kehidupan mereka. Jika

dihubungkan dengan perpustakaan kelurahan, maka keberdayaan masyarakat disini diartikan sebagai dampak pemanfaatan perpustakaan kelurahan dalam menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sehingga mampu mendukung kehidupan sehari-hari.

Setelah diuraikan mengenai definisi pemberdayaan masyarakat dan keberdayaan masyarakat, maka selanjutnya dikaji mengenai faktor penyebab sumberdaya masyarakat itu sendiri. Menurut Friedmann (Sumodiningrat, 2007), faktor penyebab pemberdayaan masyarakat ialah dua premis mayor (kegagalan dan harapan). Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dan menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan, sedangkan harapan yang dimaksud adalah adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan ini bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu sosial, melainkan cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang terasa sangat nyata di tingkat individu dan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat berbagai variabel, faktor, aspek, atau elemen yang saling bersinergi satu sama lain. Berikut ini dikemukakan model pemberdayaan masyarakat menurut Ruth Alsop, Mette Frost, dan Jeremy Holland (2006), pemberdayaan sebagai suatu kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan yang efektif, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: *Agency* dan *Opportunity Structure*.

- 1) *Agency* (Agen);

Agency didefinisikan sebagai aktor atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Aktor tersebut mampu membayangkan dan memilih pilihan-pilihan sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. Dari segi pengukuran dan tindakan untuk meningkatkan pemberdayaan, kemampuan *agency* dari seseorang atau kelompok ini dapat diperkirakan melalui sumbangan aset mereka (*asset endowment*). Menurut Moser dan Swift (Alsop, dkk 2006:10), aset adalah persediaan sumber daya yang melengkapi aktor untuk menggunakan peluang ekonomi, sosial, dan politik, untuk menjadi produktif, dan untuk melindungi diri dari guncangan. Aset memerlukan pengukuran untuk pemantauan atau analisis atau pertimbangan dalam pekerjaan operasional, meliputi: aset psikologis, informasi, organisasi, material, sosial, keuangan dan manusia.

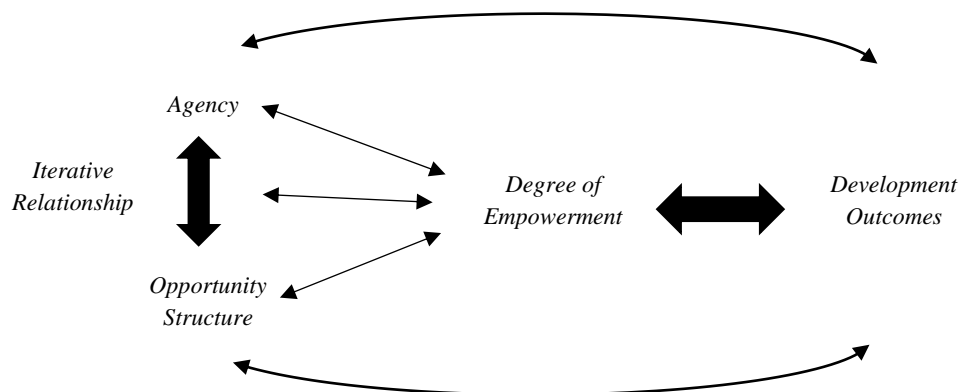
2) *Opportunity Structure* (Struktur Kesempatan);

Seorang aktor mungkin dapat memilih pilihan pilihan, tetapi realisasi yang efektif dari pilihan mereka akan sangat tergantung pada konteks kelembagaan dimana aktor melangsungkan kehidupan dan pekerjaan. *Opportunity Structure* terdiri dari lembaga-lembaga yang mengatur perilaku masyarakat dan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pilihan-pilihan yang mereka buat.

Kedua faktor di atas menunjukkan keterkaitan antara *Agency* dengan *Opportunity Structure*. *Agency* tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya yang identik dalam pemberdayaan. Bahkan, ketika orang memiliki kemampuan untuk memilih pilihan, mereka mungkin saja tidak dapat menggunakan lembaga yang efektif,

karena dibatasi struktur kesempatan, yang didefinisikan sebagai aspek konteks kelembagaan, dimana mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengubah ke dalam tindakan dengan membentuk “*rules of the games*” dalam pelaksanaan *agency*, untuk tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari efektifitas.

Aturan ini juga dapat mempengaruhi bertambahnya persediaan aset dan menentukan nilai manfaat yang mengalir dari aset tersebut. Faktor-faktor ini bersama-sama menimbulkan derajat yang berbeda dari pemberdayaan dan diasumsikan telah saling memperkuat pengaruhnya pada *development outcomes* (pengembangan hasil). Gambar 2.1 menunjukkan bahwa *Agency* dan *Opportunity Structure* berasosiasi bersama *degree of empowerment* (tingkat pemberdayaan) pengalaman seseorang atau kelompok. Hal ini juga menunjukkan hubungan antara pemberdayaan dan *Development Outcomes*.



Gambar 2.1 Model Pemberdayaan Menurut Ruth Alsop, Mette Frost Bertelsen, dan Jeremy Holland
(Alsop, *et. al*, 2006:10)

Pendapat ahli lain menjelaskan bahwa dari sisi konteks pemberdayaan meliputi Dua hal penting, terdiri dari *process* (proses), yaitu: tindakan, kegiatan, atau struktur; dan *outcome* (hasil), yaitu: kinerja atau tingkatan hasil yang dicapai atau *level of result* dari yang diberdayakan. Secara rinci Perkins & Zimmerman,

menyatakan bahwa: *“Theories of empowerment include both processes and outcomes, suggesting that actions, activities, or structures may be empowering, and that the outcome of such processes result in a level of being empowered”*(Perkins & Zimmerman, 1995). Selanjutnya Perkins & Zimmerman menjelaskan bahwa: *“Both empowerment processes and outcomes vary in their outward form because no single standard can fully capture its meaning in all contexts or populationa”*(Perkins & Zimmerman, 1995).

Menurut Anthony Bebbington (2000) dalam Mardikanto dan Poerwoko (2017) sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal *“Empowering is a process through which those excluded are able to participate more fully in decisions about forms of growth, strategies of development, and distribution of their product”*. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) aspek (Fahrudin, 2012) :

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu

dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri sehingga menjadi kelompok masyarakat yang memiliki taraf hidup berkualitas.

2.2.1. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau

kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati, Agus dan Nyoman, 2005). Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-

kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadaanyaannya. Prinsip "*mulailah dari apa yang mereka punya*", menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Setiap prinsip dalam pemberdayaan masyarakat memiliki pandangan yang berarti satu sama lainnya seperti kesetaraan, partisipasi dan mandiri dimana 3 hal ini merupakan karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki sifat gotong royong sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2.2. Tingkatan Pemberdayaan

Adapun tingkatan keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti *dalam* Hurairah (2008) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar.
2. Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
3. Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan.
4. Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain (Hurairah, 2008):

1. Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin).
2. Upaya penyadaran untuk memahami diri yang meliputi, potensi, kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungannya.
3. Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal.
4. Upaya penguatan kebijakan.

5. Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha atau kerja.

Pemberdayaan memang sebuah proses. Namun, dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak.

2.2.3. Membuat Tantangan Menjadi Peluang

Isu pengembangan daerah pedesaan sebagai salah satu strategi mengatasi persoalan kesenjangan pembangunan desa-kota dan upaya untuk redistribusi pendapatan telah banyak dikaji oleh para ahli (Azis, 1985; Chambers, 1987; Guest, 1989 *dalam* Damanik,2013). Para perencana dan pengambil keputusan melakukan intervensi program pembangunan pedesaan dengan berbagai macam bentuk, seperti pengembangan sektor industri kecil, agro-industri, perdagangan, dan sebagainya. Program tersebut menciptakan banyak perubahan, terutama pada periode tahun 1980-1990, yang ditandai antara lain oleh pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah dan agroindustri di Indonesia (Andri *dalam* Damanik,2013). Namun demikian tidak semua daerah pedesaan memiliki sumber daya yang memadai untuk dijadikan basis pengembangan industri. Dan disini muncul pemikiran untuk mengembangkan aktivitas ekonomi alternatif dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya lokal.

2.2.4. Konsep Pembinaan

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan 'power' konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar,berencana,terarah,teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan,menumbuhkan,membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang,utuh dan selaras,pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat,kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagaibekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah,meningkatkan dan mengembangkan dirinya,sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri (Simanjuntak, 1990).

Menurut Mangunhardjana (1986) untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta

didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahanan tidak punya pengalaman.

- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok.

2.2.5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu

sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

1. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

3. Kesadaran kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

4. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

5. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut (Sumodiningrat, 1999):

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok,

sertamakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Bahwa semakin tinggi kegiatan pemberdayaan dilakukan maka akan semakin meningkatkan tingkat keberdayaannya. Keberhasilan program berarti ketuntasan dalam pelaksanaan program dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan sebuah program dibuktikan dengan tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap atau nilai dalam diri seseorang. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak.

2.3 Konsep Gabungan Kelompok Tani

Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasiantarpetani. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk memonitor atau mengevaluasi kinerja kelompok tani. Kinerja tersebutlah yang akan menentukan tingkat kemampuan kelompok. Penilaian kinerja kelompok tani didasarkan pada SK Mentan No. 41/Kpts/OT. 210/1992. Fungsi kelompok tani adalah:

- a. Menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada.
- b. Sebagai media atau alat pembangunan.

- c. Membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh kelompok.

Pemberdayaan kelompok tani merupakan sebuah model pemberdayaan yang arah pembangunan berpihak pada rakyat. Kelompok tani pada dasarnya sebagai pelaku utama pembangunan di pedesaan. Kelompok tani dapat memainkan peran tunggal maupun ganda, seperti penyediaan usaha tani, penyediaan air irigasi, penyediaan modal, penyediaan informasi, serta pemasaran hasil secara kolektif. Peran kelompok tani merupakan gambaran tentang kegiatan-kegiatan kelompok tani yang yang dikelola berdasarkan persetujuan anggotanya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berdasarkan jenis usaha, atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti pengadaan sarana produksi, pemasaran, dan sebagainya. Pemilihan kegiatan kelompok tani ini berdasarkan pada kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Secara kompleks, kelompok tani adalah kumpulan petani maupun peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, Sumber Daya Manusia) dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha-usaha anggota. Kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik (Depdiknas, 2002).

Dengan demikian kelompok tani adalah kumpulan manusia yang memiliki kegiatan dalam bentuk bercocok tanam yang hidup bersama merupakan kesatuan beridentitas dan interaksi sesama sistem norma yang berlaku di dalamnya.

2.3.1 Ciri- Ciri Kelompok Tani

Kelompok tani memiliki ciri-ciri saling mengenal, akrab dan saling percaya antara sesama anggota, mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani serta memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi atau sosial, bahasa, pendidikan dan juga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

2.3.2 Unsur Pengikat Kelompok Tani

Selain dari ciri-ciri kelompok tani juga mempunyai unsur pengikat yaitu adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya dan memiliki kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama diantara para anggotanya dengan kader tani berdedikasi untuk menggerakkan para petani sehingga kepemimpinanya diterima oleh sesama petani lainya serta memiliki kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya dari sebagian besar anggotanya dan tidak terlepas dari adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan (Sado, 1989).

2.3.3 Fungsi Kelompok Tani

Adapun fungsi kelompok tani sebagai kelompok belajar, yaitu wadah mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan menjadi lebih sejahtera. Kelompok tani sebagai wahana kerja sama untuk memperkuat

kerja sama diantara sesama petani didalam kelompok tani serta dengan kelompok lain, sehingga usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan. Kelompok tani sebagai unit produksi usaha tani yang dilaksanakan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Sado, 1989).

2.3.4 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/ot.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani, Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Adanya gapoktan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan menyediakan sarana produksi pertanian, peningkatan, permodalan, atau perluasan usaha tani untuk para petani dan kelompok tani dari sektor hulu dan hilir, serta peningkatan kerjasama dan pemasaran produk.

Dalam Pembentukan Gapoktan dilakukan suatu musyawarah yang dihadiri sedikitnya oleh para kontak tani atau para ketua kelompok tani yang akan bergabung dalam organisasi Gapoktan, yang sebelumnya di tiap masing-masing kelompok telah disepakati kepengurusan gapoktan oleh para anggota kelompok yang tergabung ke dalam Gapoktan. Dalam pelaksanaan pembentukan Gapoktan sekaligus disepakati susunan kepengurusan dan jangka lama waktu kepengurusannya, ketua Gapoktan dipilih secara musyawarah dan demokrasi oleh para anggota Gapoktan, dan selanjutnya ketua untuk memilih pendamping dalam

kepengurusan Gapoktan baik itu sekretaris dan bendahara, Untuk mendapatkan legitimasi, kepengurusan Gapoktan dilakukan pengukuhan oleh pejabat Desa atau kelurahan wilayah setempat.

Gabungan kelompok tani berarti adanya beberapa kelompok tani yang bergabung dan berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Maka dari itu wilayah kerja gabungan kelompok tani sedapat mungkin di wilayah administratif desa atau Kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah Kabupaten Kota (Sado, 1989).

Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Seperti yang diungkapkan Jetkins (1961), dinamika kelompok diartikan sebagai gerak atau kekuatan yang terdapat di dalam kelompok, yang menentukan atau berpengaruh terhadap perilaku kelompok dan anggotanya dalam mencapai tujuan. Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi nonformal diperdesaan yang ditumbuh kembangkan " dari, oleh dan untuk petani "dengan ciri--ciri sebagai berikut:

- a. Saling kenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani.
- c. Memiliki kesaamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
- d. Ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama

Peningkatan kemampuan gabungan kelompok tani dimaksudkan agar mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya yang lainnya, mampu menyusun rencana defenitif gabungan kelompok tani dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efesiensi guna memfasilitasi penerapan teknologi yaitu bahan, alat dan cara usaha tani kelompok tani sesuai dengan rencana kegiatan gabungan kelompok tani dan menjalin kerja sama kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani, mentaati dan melaksanakan kegiatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun dengan pihak lain, mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan gabungan kelompok tani, untuk yang akan datang, meningkatkan kesinambungan produktifitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, mengelolah administrasi secara baik, merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun mau melakukan kegiatan gabungan kelompok tani.

Gabungan kelompok tani yang kuat dan mandiri dapat dilihat dengan adanya pertemuan pengurus secara berkala dan berkesinambungan oleh para pelaksana sesuai sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi, memiliki aturan atau norma yang disepakati dan ditaati bersama, juga memiliki pencatatan atau pengadministrasian organisasi yang rapih, sehingga dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama disektor hulu dan hilir, serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya, yang ditandai dengan adanya kemitraan dengan pihak lain, dan adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota

atau penyisihan hasil usaha kegiatan kelompok (Sado, 1989). Beberapa fungsi Gapoktan antara lain:

- a. Unit usaha jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan harga).
- b. Unit usaha jasa dan penyediaan saprotan seperti pupuk , benih bersertifikat, pestisida yang lainnya serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya.
- c. Unit usaha jasa penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit atau pinjaman kepada para petani yang membutuhkan.

Terkait dengan petunjuk pelaksanaan metode penyuluhan pertanian tertuang pada Permentan No 52 Tahun 2009 yang dimaksudkan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sesuai dengan rujukan pelaksanaan metode penyuluhan pertanian yakni Permentan No 52 tahun 2009 terdapat beberapa metode yang dijalani antara lain:

1. Teknik Komunikasi

- a. Metode Penyuluhan Langsung

Metode penyuluhan langsung dilakukan melalui tatap muka dan dialog antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha.

- b. Metode Penyuluhan Tidak Langsung

Metode penyuluhan tidak langsung dilakukan melalui perantara (media komunikasi).

2. Jumlah Sasaran

a. Pendekatan Perorangan

Penyuluhan pertanian yang dilakukan secara perorangan antara lain: kunjungan ruma/lokasi usaha, surat-menyurat, hubungan telekomunikasi.

b. Pendekatan Kelompok

Penyuluhan pertanian yang dilakukan secara berkelompok, antara lain: diskusi, karya wisata, kursus tani, pertemuan kelompok.

c. Pendekatan Massal

Penyuluhan pertanian dilakukan secara massal, antara lain : siaran televisi, pemasangan poster/spanduk, kampanye.

3. Indera Penerima dari Sasaran

Indera penerima digunakan oleh sasaran untuk menangkap rangsangan dalam kegiatan penyuluhan, semakin banyak indera penerima yang digunakan maka akan semakin efektif penerimaan informasi penyuluhan. Metode penyuluhan berdasarkan indera penerima dari sasaran terdiri atas:

a. Indera Penglihatan (penyebaran bahan cetakan, slide, album foto)

b. Indera Pendengaran (hubungan telepon, obrolan sore, siaran pedesaan)

c. Kombinasi Indera Penerima (demonstrasi cara/hasil, pemutaran film, video dan siaran televisi).

Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan metode penyuluhan pertanian pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 5 yaitu tahapan dan kemampuan adopsi, sasaran, sumber daya, keadaan daerah dan kebijakan pemerintah.

1. Tahapan dan kemampuan adopsi

a. Tahapan dan adopsi inovasi

Adopsi inovasi pada diri pelaku utama dan atau pelaku usaha berlangsung melalui serangkaian pengalaman mental psikologis secara bertahap yaitu:

- 1) Tahap penumbuhan perhatian
- 2) Tahap penumbuhan minat
- 3) Tahap menilai
- 4) Tahap mencoba
- 5) Tahap menetapkan

b. Kemampuan adopsi inovasi

Berdasarkan kemampuan adopsi inovasi, pelaku utama dapat dikelompokkan menjadi inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir dan penolak. Tahapan dan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha adopsi inovasi menentukan metode penyuluhan pertanian yang akan digunakan.

2. Sasaran (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha)

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan dari aspek sasaran, antara lain:

- a. Tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap sasaran
- b. Sosial budaya mencakup antara lain adat kebiasaan, norma-norma yang berlaku dan status kepemimpinan yang ada

c. Jumlah sasaran yang hendak dicapai pada suatu waktu tertentu.

3. Sumber Daya Penyuluhan

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan dari aspek sumber daya penyuluhan antara lain:

- a. Kemampuan penyuluh
- b. Materi penyuluhan
- c. Sarana dan biaya penyuluhan

4. Keadaan Daerah

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan dari aspek kondisi daerah, antara lain:

- a. Musim
- b. Keadaan Usaha Tani
- c. Keadaan Lapangan

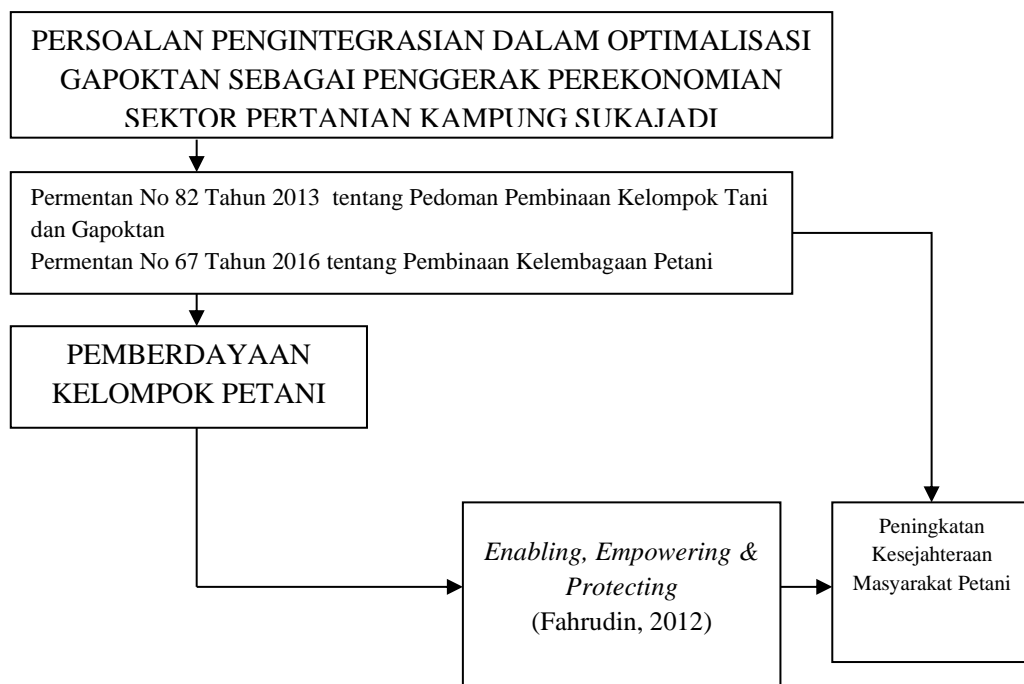
5. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah atau pemerintah daerah menentukan dalam pemilihan metode penyuluhan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1995).

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik (Soewarman, 2002).



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Potensi besar yang dimiliki berbagai jenis unit-unit usaha dalam lingkup ekonomi rakyat dapat berkembang dengan baik jika mereka mendapatkan dukungan yang memadai. potensi mereka itu dapat berkembang sebagai usaha yang independen langsung berinteraksi di pasar maupun dalam pola subkontrak. berbagai jenis unit-unit usaha rakyat itu bahkan berpotensi sebagai unit usaha kecil modern dan kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Besarnya potensi ekonomi rakyat itu dapat dilihat dari jumlah persebaran mereka.

Dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat berbagai variabel, faktor, aspek, atau elemen yang saling bersinergi satu sama lain. Berikut ini dikemukakan model pemberdayaan masyarakat menurut Ruth Alsop, Mette Frost, dan Jeremy Holland (2006), pemberdayaan sebagai suatu kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan yang efektif, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: *Agency* dan *Opportunity Structure*.

Pendapat ahli lain menjelaskan bahwa dari sisi konteks pemberdayaan meliputi dua hal penting, terdiri dari *process* (proses), yaitu: tindakan, kegiatan, atau struktur; dan *outcome* (hasil), yaitu: kinerja atau tingkatan hasil yang dicapai atau *level of result* dari yang diberdayakan. Secara rinci Perkins & Zimmerman, menyatakan bahwa: “*Theories of empowerment include both processes and outcomes, suggesting that actions, activities, or structures may be empowering, and that the outcome of such processes result in a level of being empowered*”(Perkins & Zimmerman, 1995: 570). Selanjutnya Perkins & Zimmerman menjelaskan bahwa: “*Both empowerment processes and outcomes vary in their outward form because no single standard can fully capture its meaning in all contexts or populationa*”(Perkins & Zimmerman, 1995: 570).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan dan pembinaan petani pada kelompok tani di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Nuban. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2017), Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati subjek dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan terangkat secara deskriptif mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa diintervensi oleh pengukuran formal.

Rancangan penelitian studi kasus dijalankan melalui pengungkapan banyak cerita yang diceritakan oleh orang-orang di dalam latar sosial tertentu dengan peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi secara alamiah. Oleh karena itu diusahakan keterlibatan peneliti tanpa intervensi terhadap proses yang sedang berlangsung secara apa adanya sesuai dengan realitas di latar sosial tersebut secara alamiah.

Melalui metode penelitian kualitatif dengan studi kasus diharapkan pengungkapan dan penggalan kasus secara deskriptif tentang pemberdayaan dan pembinaan petani dapat diangkat dalam gambaran yang riil dan mendekati apa adanya sesuai dengan peristiwa-peristiwa di lapangan tanpa dibayangi bias paradigma subjek peneliti. Menurut Arikunto (2010), penelitian semacam ini disebut juga sebagai penelitian naturalistik. Maksudnya, sifat naturalistik menunjukkan situasi

lapangan yang diteliti bersifat natural atau apa adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dan diintervensi dengan eksperimen. Penelitian ini dilakukan secara natural, apa adanya, dalam kondisi serta situasi normal, tidak dimanipulasi oleh keadaan, dan bersifat deskriptif alamiah. Sumber data yang diperoleh diseleksi dari keadaan yang sewajarnya dan tidak bersifat manipulatif.

3.2 Fokus Penelitian

Sebagai sebuah wadah dan motor penggerak pemberdayaan petani, Gapoktan tentu memiliki berbagai persoalan yang perlu dikaji dan diteliti secara mendalam terutama dalam melihat sejauh mana kerangka kerja administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten demi menjamin kesiapan Gapoktan dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaannya. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah menganalisis pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam menggerakkan perekonomian masyarakat pertanian ini meliputi pokok-pokok masalah pemberdayaan yang mengacu pada 3 aspek yakni *enabling*, *empowering*, dan *protecting*:

1. Menganalisis pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam menciptakan suasana atau iklim yang membuat para petani menjadi lebih produktif dalam hal bermusyawarah. Hal ini tentunya saat observasi lapangan, peneliti mengamati langsung suasana demokratis yang dilakukan oleh para anggota porktan dalam mengikuti musyawarah mingguan atau bulanan yang dalam hal ini memungkinkan bergeraknya ekonomi masyarakat pertanian (*enabling*).
Komponen serta implementasi pada *enabling* sebagai berikut antara lain:
 - a. Mendorong para petani untuk mengenal potensi daerah.

- b. Memotivasi para kelompok petani sebagai kelompok pelaku usaha agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.
 - c. Membangkitkan kesadaran antar sesama kelompok petani dalam satu wilayah demi sinergi antar kelompok tani.
2. Menganalisis pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya ekonomis yang dimiliki oleh masyarakat pertanian (*empowering*) khususnya kampung sukajadi bumiratu nuban yang mayoritas merupakan petani padi sebagai komoditas utamanya. Komponen serta implementasi pada *empowering* sebagai berikut:
- a. Melakukan langkah nyata (*input*) dalam rangka penguatan potensi yang sudah ada pada Gapoktan Sido Makmur.
 - b. Pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*)
3. Menganalisis pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam melindungi kepentingan ekonomi masyarakat pertanian yang menjadi subjek pengembangan (*protecting*) dengan cara terus mengeksplorasi serta membantu dalam mengadaptasi para petani dengan teknologi pertanian.
- a. Upaya pencegahan (preventif) persaingan yang tidak seimbang.
 - b. Tidak melakukan pembiaran kepada kelompok tani untuk terlalu bergantung pada berbagai program seperti menjaga kestabilan harga kebutuhan pertanian baik sebelum masa tanam maupun masa panen.

3.3 Lokasi dan Tahapan Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Nuban. Data penelitian akan dikumpulkan dalam 4 tahapan yaitu pra-lapangan,

tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis intensif, dan tahap penulisan laporan. Menurut Bogdan dalam Moleong (2017:126), beberapa sumber menjelaskan bahwa tahap penelitian kualitatif terbagi ke dalam tiga tahap yaitu: 1) pra-lapangan, 2) kegiatan lapangan, dan 3) analisis secara kontinu.

3.4 Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:297), subjek penelitian yang dimaksud adalah situasi sosial yang terdiri atas tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial yang disebutkan di atas bisa dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam “apa yang terjadi di lapangan” terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat tertentu.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan digeneralisasi kepada populasi melainkan ditransfer ke latar sosial lain yang memiliki kesamaan situasi sosial pada kasus yang dipelajari dalam penelitian ini.

Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut sebagai responden dan tidak disebut sebagai sampel statistik melainkan sampel teoretis karena tujuan dari penelitian kualitatif bukan menguji teori melainkan menghasilkan teori tentang kasus yang terjadi pada situasi sosial tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive* dalam memilih sumber wawancara yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sumber data yang ditetapkan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Penyuluh pertanian, Ketua Gapoktan, dan petani yang terlibat langsung dengan proses pemberdayaan di Kecamatan Bumi Nuban. Menurut Tatang, “*key informant* merupakan seseorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti”.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah diri peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument perlu divalidasi sejauhmana peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metodologis, penguasaan konsep dan wawasan terhadap bidang kajian yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki latar penelitian, baik secara akademik maupun administrative.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat pengumpulan data dengan beberapa tambahan media lain seperti kamera, alat perekam, dan pedoman wawancara. Jadi instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri dilengkapi dengan pedoman wawancara, kamera, alat rekam, dan *gadget*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muhadjir (2000), aktivitas pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi dan konteks peneliti di lapangan (*natural setting*). Oleh

karenanya pengumpulan data harus langsung diikuti dengan proses menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikan analisis selama pengambilan data. Penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung, wawancara, pengamatan/ observasi, dan studi dokumen.

3.6.1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini, pelaksanaan wawancara tidak lepas dari pedoman yang digunakan. Pada tahap awal wawancara peneliti akan memulai dengan cara yang tidak terstruktur dengan hanya memuat garis besar yang ditanyakan bertujuan untuk memberi kesempatan dan kebebasan terhadap narasumber memberi kontribusi terhadap kepingan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti ini. Langkah berikutnya adalah melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman terstruktur dan disusun secara terperinci sehingga memungkinkan hasil wawancara dalam bentuk *checklist* atau daftar cocok.

Untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data disusunlah pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu:

- a. Data yang berkaitan dengan gambaran permasalahan SDM yang dialami oleh kelompok tani di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Nuban
- b. Data yang berkaitan dengan proses pemberdayaan dan pembinaan kepada kelompok tani di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Nuban.

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bugin,

2007). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (*Key Informan*). Yang dimaksud Informan penelitian utama (*Key Informan*) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Bugin, 2007).

Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian utama (*key informan*) adalah semua orang yang berhubungan dengan kelompok tani kampung sukajadi yakni Gapoktan Sidomakmur Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah. Selain menggunakan informan penelitian utama (*key informan*), penelitian ini juga menggunakan sumber data penunjang (sekunder). Yang dimaksud data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari bahan kepustakaan sebagai penunjang dari data utama (*key informan*). Berikut adalah profil informan penelitian ini.

Tabel 3.1. Profil Informan Penelitian

No	Nama	Usia (tahun)	Pendidikan	
1	Suhari	41	-	Ketua Gapoktan
2	Bejoriyanto	53	SLTU	Bendahara Gapoktan
3	Sahmin	37	SLTP	Ketua Poktan
4	Ulin Nuha	38	-	Petani
5	Munandar	45	SMU	Petani
6	Wahyudi	44	SMA	Sekretaris Gapoktan
7	Sunardi	-	-	PPL

Sumber: Data diolah, 2021

Gabungan kelompok tani Sido Makmur Kampung Sukajadi merupakan Gapoktan yang telah berdiri sejak tahun 2008 dan hingga saat ini memiliki sebanyak 10

anggota kelompok tani. Total keseluruhan petani yang tergabung dalam Gapoktan Sido Makmur sebanyak 390 petani dari 10 poktan. Masing-masing kelompok tani pada Gapoktan Sido Makmur ini sendiri ada yang sudah berdiri sejak tahun 1980 dan paling baru yaitu Kelompok Harapan Jaya yang terbentuk tahun 2015. Sejatinya kelompok tani, maka diharapkan mampu membantu program pemerintah pusat dan daerah terkait dengan kesejahteraan petani khususnya dalam bidang ketersediaan pendukung pertanian maupun pengembangan teknologi.

3.6.2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menunjang atau melengkapi data wawancara. Melalui teknik observasi ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang tidak terjangkau oleh teknik wawancara sehingga data yang diperoleh betul-betul dapat melengkapi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun dalam kegiatan observasi data yang diperlukan oleh peneliti meliputi data:

- a. Profil kompetensi dan profesionalisme kelompok tani di Sukajadi Kecamatan Bumi Nuban seperti program kegiatan musyawarah rutin secara mingguan dan bulanan
- b. Tahapan, dukungan, hambatan serta tindak lanjut atau *follow up* dari seluruh program pemberdayaan dan pembinaan kepada kelompok yang ada di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumi Nuban seperti kegiatan menerima bantuan penggilingan padi, pembagian pupuk bersubsidi, pengelolaan pupuk organik.

Tabel 3.2. Tabel Observasi Penelitian

No	Kegiatan	Penjelasan
1	<p>Musyawahar Rutin (Mingguan)</p> 	<p>Observasi di lapangan terpantau sebanyak 23 anggota yang mengikuti musyawarah rutin yang diselenggarakan oleh Gapoktan. Melalui pengamatan, sekitar kurang lebih 40% anggota rapat aktif dalam rapat tersebut.</p>
2	 <p>Menerima Bantuan Penggilingan Padi</p>	<p>Poktan menerima bantuan penggilingan padi yang dipergunakan ketika musim panen telah tiba, hal ini diperuntukkan petani yang masih kekurangan bantuan alat teknologi dalam pengolahan hasil panen.</p>

<p>3</p>	<p>Musyawarah Rutin (Bulanan)</p> 	<p>Musyawarah besar yang dilakukan berkala, dengan menghadirkan narasumber dari dinas/vendor tertentu. Biasanya dihadiri sekitar 65 masyarakat dari kelompok tani. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti menemukan setidaknya lebih dari 70% peserta musyawarah ikut aktif serta vocal dalam melakukan musyawarah untuk menyelesaikan beberapa problem yang dialami oleh petani.</p>
<p>4</p>	<p>Pembagian Pupuk Bersubsidi</p> 	<p>Penyaluran/ pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan program rutin dari GAPOKTAN. Hal ini sangat memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Saat pendistribusian, dilakukan di waktu pagi hari oleh anggota GAPOKTAN.</p>

3.6.3. Dokumen

Teknik lainnya yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen adalah sebagai berikut:

- a. Data yang berkaitan dengan profil Kelompok Tani meliputi identitas, aktivitas, dan karakteristik yang dimiliki.
- b. Data yang berkaitan dengan program atau kegiatan pemberdayaan dan pembinaan meliputi: dokumentasi arsip, laporan dan foto kegiatan.
- c. Data yang berkaitan dengan tindak lanjut atau *follow up* dari kegiatan pemberdayaan dan pembinaan Gapoktan.
- d. Peraturan Menteri Pertanian meliputi diantaranya : Nomor 67/Permentan/ SM.050/ 12/ 2016, Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013, Nomor 273 Tahun 2007.

3.7 Keabsahan Data

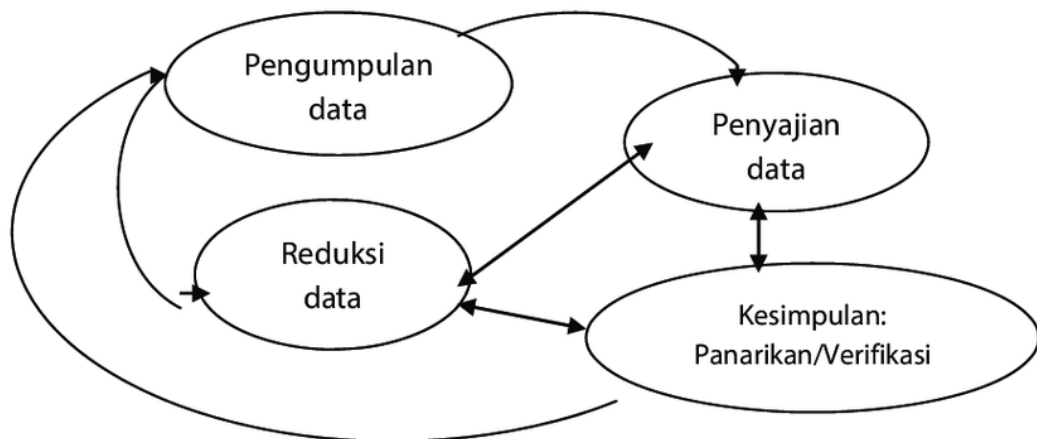
Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menyeleksi data berdasarkan tingkat kepercayaan terhadap data. Proses pemeriksaan keabsahan data perlu dilakukan dengan meningkatkan kesungguhan pengamatan, melakukan proses triangulasi dan diskusi dengan pihak-pihak otoritatif yang dapat menampilkan data pembandingan. Triangulasi merupakan upaya pengujian tingkat kepercayaan dan kredibilitas data dengan menggabungkan kumpulan data yang diperoleh melalui berbagai cara dan sumber data yang telah ada. Tujuan triangulasi teknik selain memeriksa kredibilitas data yang diperoleh juga terkait dengan kekuatan data dalam menggambarkan realitas/ kenyataan.

Menurut Moleong (2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding data tersebut. Diharapkan upaya tersebut menghadirkan kebenaran yang betul-betul konvergen sebagai akibat dari proses pemeriksaan ulang, pensiklusian kembali, tanpa mengurangi perspektif *emic* yakni perspektif narasumber dalam memandang dan menafsirkan kasus yang dialami.

Menurut Miles dan Huberman (1992), triangulasi seharusnya mendukung satu temuan dengan memperlihatkan bahwa ukuran yang tidak tergantung darinya sesuai dengan temuan tersebut atau paling tidak, tidak bertentangan dengan temuan tersebut. Triangulasi juga disebut sebagai retorika yang menyiratkan bahwa apabila satu elemen dari triangulasi tersebut diketahui maka terdapat dua data yang dimiliki merupakan ukuran kesetujuan atau ketidaksetujuan sehingga memerlukan informasi tambahan yang mungkin berupa data dari sumber ketiga yang benar ada yakni sumber data yang posisinya berhubungan dengan sumber lain yang telah diketahui.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles Huberman dalam (Sugiyono, 2019), diilustrasikan sebagai berikut.



Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)

Sumber: Sugiyono, 2012

Ilustrasi di atas memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik. Berdasarkan penjelasan di atas analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data (*Data Reduction*).

Yaitu suatu proses merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila

diperlukan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dianalisa melalui tahapan penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahannya atau diarahkan dari arti data tersebut.

2. Penyajian data (*Data Display*).

Yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir ke dalam matriks analisis data disajikan ke dalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, foto, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "*grounded*", dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan terkait dengan penelitian ini antara lain

1. *Enabling*

Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mengenal potensi yang dimiliki oleh Kampung Sidomakmur, sehingga hal ini bisa dimaksimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui jalur pertanian. Hal ini diciptakan melalui suasana yang sinergi, harmonis serta kekeluargaan antar sesama kelompok petani.

Suasana serta iklim pada anggota kelompok tani di Kampung Sukajadi sangat kondusif dan diadakan dengan asas demokrasi. Hal ini tergambarkan dilapangan rutin dilakukannya musyawarah secara bulanan, studi banding, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pembinaan. Dengan rutin diadakannya musyawarah diharapkan petani yang tergabung dalam Gapoktan mampu menyampaikan aspirasi serta meningkatkan potensi pertanian yang dimiliki.

2. *Empowering*

Sudah adanya bentuk nyata untuk penguatan daya untuk langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikemukakan bahwa sebuah pemberdayaan masyarakat petani melalui peran Gapoktan perlu adanya pertimbangan yang cukup matang terkait dengan penentuan stakeholder demi menunjang kesejahteraan petani. Gapoktan Sidomakmur melakukan langkah nyata

dengan cara melakukan kerjasama kepada stakeholder antara lain penyuluh pertanian selaku dinas terkait untuk memberdayakan Gapoktan Setempat.

Perluasan akses kerjasama untuk menciptakan berbagai peluang untuk memudahkan petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Dibuktikan dalam bentuk kemudahan akses untuk anggota Gapoktan dalam mendapatkan pupuk serta kebutuhan pertanian lainnya kepada penyedia kebutuhan pertanian yang dalam hal ini sudah ditentukan oleh Gapoktan Sido Makmur.

3. *Protecting*

Peran Gapoktan Sido Makmur sangat vital dalam menjaga keseimbangan kesejahteraan anggota kelompok tani guna menjaga kestabilan kesejahteraan pertanian melalui tidak terbang pilih serta terus memantau permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok tani. Pentingnya menjaga kualitas organisasi Gabungan Poktan cukup terasa dalam jangka waktu yang panjang bagi Gapoktan Sido Makmur Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban. Seiring berjalannya waktu Gapoktan ini merupakan contoh atau role model salah satu Gapoktan yang berkelanjutan serta memiliki potensi untuk peningkatan kualitas kesejahteraan petani. Lebih jauh, peran Gapoktan Sido Makmur penting dalam memperbaharui teknologi pertanian untuk para anggota kelompok tani. Seperti saat ini petani sudah mengenal dengan kemudahan dalam mengelola sampai melakukan panen hasil pertanian dengan menggunakan teknologi kultivator dan rotavator.

5.2.Saran

1. Untuk Stakeholder

Unsur perluasan pemberdayaan serta pemberdayaan kolaboratif belum terdapat pada pelaku utama Gabungan Poktan itu sendiri. Hal ini sejatinya diperlukan untuk menunjang kemudahan dalam pertukaran informasi yang merujuk pada kualitas pengetahuan petani itu sendiri, sehingga secara langsung juga akan berdampak pada pertumbuhan organisasi gabungan kelompok tani.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Keterbatasan informasi baku seperti dokumen rujukan dari dinas terkait menjadi hambatan bagi penelitian ini. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu mengangkat terkait pemberdayaan gabungan kelompok tani yang berorientasi terhadap perkembangan teknologi, khususnya dengan situasi isu persaingan import komoditi produk hasil pertanian sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Alsop, Ruth, Mette Frost Bertelsen, dan Jeremy Holland. 2006. *Empowerment in Practice – from Analysis to Implementation*. Washington, DC: The World Bank.
- Anwar Sanusi. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Cetakan ke-6)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Arikunto, Suharismi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azizy, Ahmad Qodri A. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*. Lembaga Executive Club (LEC) Press. Jakarta.
- Bhimo, Johan Sukoco. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Perpustakaan Kelurahan di Kelurahan Panularan Kota Surakarta*. Skripsi. Prodi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Carr, Alexis M., Moses Tenywa, & K. Balasubramanian. 2015. *From Learning to Empowerment: A Study of Smallholder Farmers in South West Uganda*. *Journal of Learning For Development*. Vol. 2, No. 3, pp. 1-15.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002).
- Desiana, Nia & Atik Aprianingsih. 2017. *Improving Income through Farmers' Group Empowerment Strategy*. *The Asian Journal of Technology Management Vol. 10 No. 1: 41-47*. School of Business and Management. Institut Teknologi Bandung. Indonesia.
- Fahrudin, Adi . 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Penerbit Humaniora. Bandung.
- Sado, Hamzah. 1989. *Penumbuhan, Pengembangan Kelompok Tani dan Gapoktan*. Pusdiklat Depnaker. Gowa.

- Hurairah, Abu . 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*. Penerbit Humaniora. Bandung
- Janati, Nia. 2015. *Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerepan Identitas Berbasis Single Identity Number di Kabupaten Lampung Utara*. Tesis. Magister Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Kusuma, Ika Purnama Sari. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan (Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah)*. Jurnal. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Mardikanto, Totok. 2010. *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Pertanian UNS dengan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). Surakarta.
- Handewi, P.S. Rahman, Mewa Ariani, Sri Hastuti dan Wahida. 2002. *Impact of Economic Crisis on Farmer Household and The Anticipation of Copnigh*. Jurnal Media Gizi dan Keluarga Vol 25 (01).
- Miles B. Bathew dan Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. UI Press. Jakarta .
- Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosadakarya. Bandung.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta
- Mulyadi. 2012. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

- Najiati, Sri, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International. Bogor.
- Narayan, Deepa. (ed). 2002. *Empowerment and Poverty Reduction: A Source Book*. Washington, DC: PREM – The World Bank.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Perkins, D. D, dan Marc A. Zimmerman. 1995. “*Empowerment theory, Psychology*”. October 1995 Vol.23. New York.
- Permadi, Budi. 2019. *Community Empowerment and Farmer Poverty Reduction in Developing Countries*. *Journal of Public Administration Studies*. JPAS Vol. 4, No. 1, pp. 9-13.
- Purnamasari, Andi Maya. 2011. *Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal*. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Rachim, Erik, Muhammad Basri, Fakhri Kahar. 2018. *Implementation of Community Empowerment Of Farmers Takalar Regency, South Sulawesi, Indonesia*. *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS)*. Volume 11, Issue 6 Ver. I (June 2018), PP 52-57.
- Rohana, Emi. 2014. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Tembi*. *Jurnal*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.
- Soewarman, Engking Hasan. 2002. *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*. Pustaka Rosda Karya. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suhendra. 2006. *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan . 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sun'an, Muammil & Abdurrahman Senuk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.

Wrihatnolo, Randy R. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Komputindo. Jakarta.

Faujiah, L., & Suhandi. (2020). Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dalam Pembangunan Desa (Studi Desa Balairajo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Sosio Religia*, 1(1), 1–11.

Holikman, Afrianto, E., & Susilawati, W. (2019). *Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo the Role of Combined Tani Group (Gapoktan) in Empowerment of Sawah Rice Farmers in Tuo Village Sumay Subdistrict*. 45–60.

Mulia, S., Rizka, M. A., & Herlina. (2016). *Efektivitas Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. 2(September), 1–23.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

<http://www.infodiknas.com/definisi-dan-teori-pemberdayaan.html>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020. Pukul 22.40.

<http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/kebijakan-pangan-untuk-sejahterakan-petani>

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4530>